

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian mengenai Strategi Komunikasi Protokol Pemerintah Daerah dalam Mendukung Kelancaran Kegiatan Bupati Bengkulu Utara, dapat disimpulkan bahwa strategi komunikasi yang diterapkan oleh Bagian Protokol Pemerintah Daerah memiliki peran yang sangat penting dalam mendukung keberhasilan setiap agenda dan kegiatan Bupati. Keberhasilan tersebut ditentukan oleh kemampuan Bagian Protokol dalam merencanakan, mengoordinasikan, melaksanakan, serta mengevaluasi setiap kegiatan secara sistematis.

1. Strategi komunikasi yang diterapkan meliputi penyusunan perencanaan kegiatan, koordinasi yang intensif dengan perangkat daerah, instansi vertikal, aparat keamanan, panitia penyelenggara, serta pihak-pihak lain yang terlibat dalam pelaksanaan kegiatan. Komunikasi dilakukan melalui rapat koordinasi, surat resmi, media komunikasi digital, dan komunikasi langsung untuk memastikan seluruh informasi tersampaikan secara jelas, tepat, dan tidak menimbulkan kesalahpahaman.
2. Manajemen komunikasi dilaksanakan melalui koordinasi yang intensif antara Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan dengan Bupati, Sekretaris Daerah, Organisasi Perangkat Daerah (OPD), Forkopimda, aparat keamanan, panitia penyelenggara, serta pihak-pihak lainnya.

Pengelolaan arus informasi yang cepat, akurat, dan berkesinambungan menjadi faktor penting dalam menghadapi perubahan agenda, perubahan lokasi, maupun kondisi lapangan yang bersifat dinamis sehingga pelaksanaan kegiatan tetap berjalan sesuai tujuan.

3. Pada tahap pelaksanaan, komunikasi dilakukan melalui berbagai media, seperti rapat koordinasi, komunikasi tatap muka, telepon, surat resmi, grup WhatsApp, dan Handy Talky (HT). Pemanfaatan berbagai media komunikasi tersebut mempercepat penyampaian informasi, memperlancar koordinasi, serta memudahkan penanganan perubahan situasi di lapangan. Meskipun masih terdapat kendala berupa perubahan jadwal secara mendadak dan keterbatasan waktu persiapan, Bagian Protokol mampu melakukan penyesuaian komunikasi sehingga kegiatan tetap dapat berlangsung dengan tertib.
4. Evaluasi komunikasi dilakukan setelah pelaksanaan kegiatan melalui identifikasi hambatan, penilaian efektivitas koordinasi, serta penyusunan solusi sebagai bahan perbaikan pada kegiatan berikutnya. Evaluasi menjadi bagian penting dalam meningkatkan kualitas pelayanan keprotokolan karena memberikan masukan terhadap strategi komunikasi yang telah diterapkan serta mendorong terciptanya koordinasi yang semakin efektif.

Secara keseluruhan, strategi komunikasi yang dilaksanakan oleh Bagian Protokol Pemerintah Daerah Kabupaten Bengkulu Utara telah berjalan dengan baik dan mampu mendukung kelancaran kegiatan Bupati.

Keberhasilan tersebut didukung oleh koordinasi yang baik, komunikasi yang terbuka, kemampuan beradaptasi terhadap perubahan situasi, serta profesionalisme aparatur keprotokolan dalam menjalankan tugasnya.

5.2 Saran

Berdasarkan hasil penelitian, penulis memberikan beberapa saran sebagai berikut.

1. Bagian Protokol Pemerintah Daerah Kabupaten Bengkulu Utara diharapkan terus meningkatkan kualitas koordinasi dan komunikasi dengan seluruh OPD maupun instansi terkait melalui mekanisme komunikasi yang lebih terstruktur dan berkelanjutan.
2. Perlu dilakukan penguatan pemanfaatan teknologi informasi, seperti penggunaan aplikasi manajemen agenda atau sistem koordinasi digital, sehingga penyampaian informasi dapat dilakukan secara lebih cepat, akurat, dan terdokumentasi dengan baik.
3. Pemerintah Daerah diharapkan memberikan peningkatan kapasitas sumber daya manusia melalui pendidikan dan pelatihan di bidang komunikasi, keprotokolan, manajemen acara, serta penanganan situasi darurat agar pegawai Protokol semakin profesional dalam menjalankan tugasnya.
4. Diperlukan penyusunan dan penerapan Standar Operasional Prosedur (SOP) komunikasi yang lebih rinci, khususnya dalam menghadapi perubahan agenda secara mendadak, sehingga koordinasi antarinstitusi dapat tetap berjalan secara efektif.

5. Penelitian selanjutnya diharapkan dapat mengembangkan kajian mengenai strategi komunikasi pemerintahan dengan menggunakan teori komunikasi lainnya atau melihat aspek komunikasi protokol dari perspektif masyarakat, media, maupun perangkat daerah sebagai penerima pesan.

